

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah gizi di Indonesia masih terus berlanjut dan belum terpecahkan, karena mengembangkan sumber daya manusia (SDM) secara kuat disebabkan oleh nutrisi yang kurang baik. Masalah gizi buruk khususnya kekurusan dan *stunting* pada anak balita masih sangat serius. Permasalahan anemia, kurang energi kronis (KEK) yang terjadi pada seorang ibu hamil. Efek dari malnutrisi yang terjadi pada ibu hamil mengakibatkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR), Kurangnya asupan gizi terhadap anak balita sehingga menjadi pendek (*stunting*).

Menurut Stewart et al., (2013), *Stunting* memberikan dampak ekonomi yang besar di tingkat individu, rumah tangga, hingga masyarakat. *Stunting*, juga dikenal sebagai kerdil, merupakan kelainan pada bayi yang mengalami perkembangan yang tidak sempurna dalam hal panjang atau tinggi badan yang lebih rendah dari usianya (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Adapun penyebab *stunting* berhubungan erat dengan keadaan kehidupan seseorang. Keadaan politik dan ekonomi lokal, populasi penduduk, standar pendidikan, kultur masyarakat, pola makan, air, sanitasi, dan kualitas lingkungan adalah beberapa faktor penyebab *stunting*. Sejumlah faktor misalnya pekerjaan orang tua, jenjang pendidikan kedua orang tua, beserta seluruh anggota keluarga, memengaruhi keadaan ekonomi keluarga (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika isu *stunting* (pendek) atau pertumbuhan dan masalah gizi

ini tidak diatasi secara tegas, pemerintah Indonesia memperkirakan bakal melemah 2-3% produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya sebesar 2-3% per tahun (Bappenas, 2018). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi *Stunting* di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6% (Kemenkes Ri, 2022).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah bertujuan untuk menurunkan tingkat pencegahan *stunting* di Indonesia mencapai 14%. Fokus ini dapat dicapai tentunya yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mensinkronisasikan program-program mulai di skala nasional hingga desa (Bappenas, 2018). Tindakan ini diambil bersama untuk memperluas sasaran target ini menjadikan kabupaten/kota dan desa terpilih sebagai fokus lokasi. Seluruh wilayah yang menjadi target akan diperbanyak secara berkala ke wilayah kabupaten/kota di Indonesia. (Bappenas, 2018).

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2020, populasi *stunting* pada anak di Indonesia mencapai 26,92%, sedangkan untuk tahun 2021 turun menjadi 24,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2022, populasi *stunting* terjadi kembali turun berubah menjadi 21,6% (Sehat Negeriku, 2023). Meskipun prevalensi menunjukkan adanya penurunan dari periode 2020 hingga 2022, walaupun angka ini masih tergolong tinggi, karena angkanya tidak jauh dari ketentuan World Health Organization (WHO), yaitu maksimal 20%.

Berbagai upaya untuk meningkatkan sinkronisasi program percepatan penurunan *stunting* telah diatur dalam Permendagri No. 31 Tahun 2019 tentang

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Melalui Permendagri ini, pemma diinstruksikan untuk menyertakan langkah-langkah percepatan penurunan *stunting* dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pihak pemerintah daerah berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan lintas sektoral untuk mempercepat penurunan *stunting* dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Sehingga kabupaten hingga desa, terutama yang memiliki desa prioritas, perlu meningkatkan upaya konvergensi dalam percepatan penurunan *stunting*. Secara garis besar, dengan upaya penyatuan pendekatan intervensi yang terintegrasi secara bersama-sama, terintegrasi dan kolaboratif. Berbagai upaya tersebut harus terintegrasi secara lintas sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

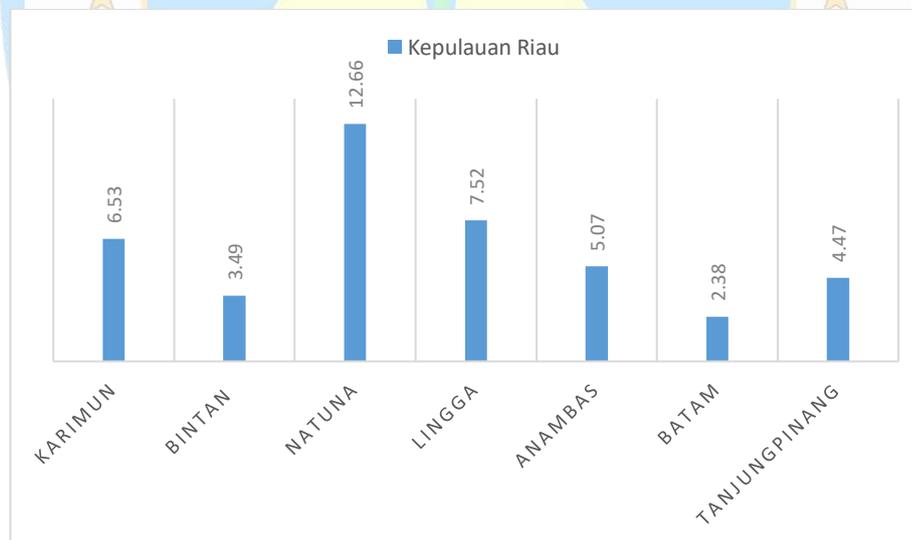
Pertumbuhan anak dari status gizi buruk tumbuh lebih lambat dari remaja normal lainnya hingga masa pubertas. Remaja yang terhambat pertumbuhannya menghadapi risiko terserang penyakit kronis yang lebih tinggi, termasuk obesitas. Remaja yang mengalami *stunting* dua kali lebih cenderung mengalami obesitas dibandingkan remaja dengan berat badan normal (Ayu Patmawati, 2022).

Stunting termasuk dalam satu masalah gizi yang paling penting, terlebih lagi di negara-negara miskin dan negara berkembang. *Stunting* atau kekerdilan ialah kondisi tumbuh pendek yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan linier anak balita, hal ini menyebabkan akumulasi malnutrisi mulai dari dalam kandungan hingga menuju usia 24 bulan. Asupan gizi yang tidak memadai pada masa pertumbuhan anak mengakibatkan gangguan perkembangan fisik dan mental, serta dapat menimbulkan kematian. Bayi berusia di bawah lima tahun yang menderita

stunting berisiko mengalami hambatan perkembangan otak secara permanen, yang diikuti dengan perkembangan intelektual, perkembangan motorik, dan bahasa yang tidak optimal (Ayu Zizi et al., 2023).

Peraturan tersebut menjadi rujukan bagi program pencegahan *stunting* secara nasional. Pencegahan *stunting* menjadi sebuah prioritas yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan karena pertumbuhan pada masa usia dini penting untuk diperhatikan. Pasalnya, salah satu sebab terjadinya *stunting* dapat berasal dari faktor lingkungan dan juga makanan yang dikonsumsi, khususnya terkait dengan sumber gizi dan vitamin. Seiring dengan meningkatnya persentase masalah *stunting*, saat ini semakin banyak langkah-langkah yang dilakukan di setiap daerah di Indonesia melalui pengawasan pemerintah (Ayu Patmawati, 2022).

Gambar 1. 1 Prevelensi *Stunting* Di Kepulauan Riau tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 (telah diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas merupakan data prevelensi persentase *stunting* di Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau di tahun 2023. Kabupaten Karimun memiliki 6.53% kasus *stunting*, Kabupaten Bintan mencatat 3,49% kasus *stunting*, Kabupaten Natuna terdapat kasus *stunting* sebesar 12,66%, Kabupaten Lingga memiliki kasus *stunting* sebesar 7,52%, Kabupaten Anambas mencatat 5,07% kasus *stunting*, Kota Batam terdapat 2,38% kasus *stunting*, dan Kota Tanjungpinang memiliki kasus *stunting* sebesar 4,47%. Berdasarkan gambar prevelensi Kabupaten/Kota di Kepulauan masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki jumlah persentase prevelensi yang tinggi, serta ada juga Kabupaten/Kota.

Menurunkan angka kasus *stunting* saat ini termasuk salah satu tujuan paling utama pemerintah Indonesia. Terlihat dari komitmen pemerintah dalam mengurangi jumlah anak yang mengalami *stunting* yang diterbitkan oleh Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 untuk mempercepat pengurangan *stunting*. Perpres ini menetapkan batas target penurunan angka *stunting* hingga 14% di seluruh Indonesia yang harus dicapai pada tahun 2024. Percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan di seluruh jajaran pemerintah Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pemerintah desa. Salah satunya di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Kijang Kota.

Bintan merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Riau. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pada tahun 2019, terdapat 604 kasus bayi yang mengalami keterlambatan pertumbuhan dengan tingkat prevalensi sebesar 4,4%. Pada tahun berikutnya, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 871 dengan prevalensi 6,7%. Namun, pada tahun 2021, jumlah kasus menurun menjadi

570 dengan prevalensi 4,7%. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah kasus kembali menurun menjadi 383 dengan prevalensi 3,19%. Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kasus *stunting* menjadi 380 dengan tingkat prevalensi sebesar 3,32%.

Jelas tingkat *stunting* menurun, namun masih ada beberapa desa yang jumlah angka *stunting*nya meningkat. Meskipun data untuk kabupaten secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan angka *stunting*, masalah Jangan sampai hal ini dipandang sebelah mata. Sebab, masalah *stunting* memiliki banyak konsekuensi negatif. Anak-anak adalah sumber daya manusia (SDM) yang nantinya akan menentukan keberhasilan masyarakat suatu daerah. Jika masalah ini tidak diatasi, maka nantinya akan dihasilkan tenaga kerja yang kurang terampil untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah ini penanganan *stunting* sebaiknya menjadi perhatian bagi daerah, khususnya Bintan.

Berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Bupati Bintan, penurunan angka *stunting* harus diprioritaskan untuk mencapai status bebas *stunting* di Bintan (Batamnews, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan berupaya untuk menurunkan angka *stunting* dan memperkecil angka kejadian kasus *stunting* baru.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah melaksanakan beragam langkah dalam mempercepat penurunan *stunting*. Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memenuhi mandat nasional untuk menurunkan *stunting* salah satunya dibuktikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 21 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan dan Pengurangan *stunting*. Melalui adanya peraturan ini,

pemerintah daerah berupaya mengurangi populasi *stunting* guna mewujudkan regenerasi muda atau generasi muda yang lebih sehat, cerdas berkualitas, produktif, dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Percepatan penurunan *stunting* memiliki beberapa dampak positif dari segi pemerintahan, antara lain:

1. Peningkatan Kualitas SDM: *stunting* dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan perkembangan anak, seperti terhambatnya pertumbuhan fisik dan kognitif, serta meningkatnya risiko penyakit kronis. Percepatan penurunan *stunting* akan meningkatkan kualitas SDM di masa depan, karena anak-anak yang terhindar dari *stunting* akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai potensi maksimalnya.
2. Peningkatan Produktivitas: Anak-anak yang *stunting* cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih rendah dan lebih mudah terserang penyakit. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas di masa depan. Percepatan penurunan *Stunting* akan meningkatkan produktivitas angkatan kerja, karena anak-anak yang terhindar dari *stunting* akan lebih sehat, cerdas, dan produktif.
3. Pengurangan Beban Ekonomi: *stunting* dapat menyebabkan beban ekonomi yang besar bagi keluarga dan negara. Biaya pengobatan dan perawatan anak *stunting*, serta kehilangan produktivitas akibat *stunting*, dapat menghambat pembangunan ekonomi. Percepatan penurunan *stunting* akan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga dan negara.

4. Peningkatan Daya Saing Bangsa: *stunting* dapat menyebabkan penurunan daya saing bangsa. Negara dengan tingkat *stunting* yang tinggi akan tertinggal dari negara lain dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Percepatan penurunan *stunting* akan membantu meningkatkan daya saing bangsa.
5. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Percepatan penurunan *stunting* menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
6. Peningkatan Legitimasi Pemerintahan: Keberhasilan dalam menurunkan angka *stunting* dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah yang mampu mengatasi masalah *stunting*.
7. Peningkatan Kinerja Pemerintahan: Percepatan penurunan *Stunting* membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor pemerintah. Hal ini dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): *stunting* merupakan salah satu target yang ingin dicapai dalam TPB. Percepatan Penurunan *Stunting* akan membantu Indonesia dalam mencapai TPB.
9. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: *stunting* dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Percepatan penurunan *Stunting* akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

10. Mewujudkan Generasi Emas Indonesia: Generasi emas Indonesia adalah generasi yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang. Percepatan penurunan *Stunting* merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

Program penurunan *stunting* dapat dicegah dengan berbagai upaya seperti kegiatan Posyandu yang bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan yakni menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) makanan bergizi untuk balita terkena *stunting* pada ibu hamil. Namun, dapat dilihat Kelurahan Kijang Kota memiliki 21 posyandu yang menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Posyandu adalah salah satu aset terpenting dalam upaya pencegahan *stunting*. Ini adalah tempat di mana anak-anak balita dapat diperiksa secara rutin, menerima imunisasi, dan mendapatkan gizi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan posyandu, agar dapat memberikan fasilitas perawatan dan pendidikan langsung kepada masyarakat setempat.

Tabel 1. 1 Fasilitas Kesehatan Di Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintim

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	21

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Menurut data dinas kesehatan tahun 2023, tercatat ada 15 kasus *stunting* di Kecamatan Bintan Timur, khususnya di Kelurahan Sungai Lekop, sedangkan di Kelurahan Kijang Kota ada 33 kasus *stunting*. Kelurahan Kijang Kota adalah suatu kelurahan yang mendapatkan keleluasaan untuk membangun kesejahteraan

masyarakatnya, salah satunya pembinaan kesehatan yaitu melalui posyandu sebagai upaya pencegahan *stunting*, demi kemajuan dan kepentingan masyarakatnya.

Tabel 1. 2 Data Balita *Stunting* di Kecamatan Bintan Timur

NO	KELURAHAN	JUMLAH BALITA <i>STUNTING</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	KEL. KIJANG KOTA	40	26	33	27	33
2	KEL. SUNGAI ENAM	4	4	3	3	3
3	KEL. SUNGAI LEKOP	10	10	20	15	16
4	KEL. Gn. LENGKUAS	5	5	4	20	11
TOTAL		59	45	60	65	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2024 (telah diolah kembali)

Berdasarkan dari tabel diatas data balita *stunting* di Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota, terdapat 40 kasus yang mengalami *Stunting* pada tahun 2019. Pada tahun berikutnya, jumlah balita *stunting* menurun drastis menjadi 26 kasus, namun kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 33 kasus. Pada tahun 2022, angka *stunting* kembali menurun menjadi 27 kasus. Sementara itu, pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah balita *stunting* namun tidak signifikan, yakni mencapai 33 kasus. Sehingga perlu dilakukan adanya evaluasi dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Bintan Timur khususnya Kelurahan Kijang Kota. Dikarenakan dari beberapa kelurahan dilihat dari data angka Kelurahan Kijang Kota ini adalah data yang signifikan mengalami peningkatan, sedangkan beberapa kelurahan lain mengalami

penurunan. Sehingga fokus penelitian di Kelurahan Kijang Kota ini layak di evaluasi.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengevaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di kelurahan kijang kota kecamatan bintang timur.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan latar belakang di atas, dapat penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini, ialah Bagaimana Evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Dalam Menurunkan Prevalensi *Stunting* Di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini yakni ingin, mengukur Evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* dalam menurunkan prevalensi *stunting* di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah kontribusi penulis dengan harapan penelitian ini berharap dapat menghasilkan dampak positif bagi banyak kalangan untuk pembaca pada penelitian ini di antaranya:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat Teoretis merupakan Manfaat Penelitian ini nantinya diharapkan sebagai penambah pemahaman sekaligus memperkaya ragam ilmu pengetahuan

yang telah diteliti dari segi teoretis. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis di masa depan

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan menambah acuan untuk penelitian yang akan datang tentang evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang program percepatan *stunting* di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai penurunan *stunting* di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penjelasan manfaat penelitian yang berguna untuk memecahkan masalah dalam Secara praktis, penelitian ini dapat mengarahkan kepada beberapa subjek penelitian.

1. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah terhadap evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di kecamatan bintang timur khususnya Kelurahan Kijang Kota.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian terhadap masyarakat dapat mengenai evaluasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Kijang Kota, dengan tujuan pemerintah daerah menurunkan prevalensi *stunting* dan faktor-

faktor yang mempengaruhi Evaluasi Program Percepatan Penurunan
Stunting di Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintang Timur.

